KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Tenaga Pendamping Bukan Alat Politik
Tanggal : Senin, 26 Juni 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Tenaga Pendamping Bukan Alat Politik

DPR: Kemendes PDTT Main Yang Cantik Lah

Senayan menyoroti fenomena tenaga pendamping desa yang dikerahkan untuk kepentingan politik tertentu. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) diminta memberdayakan pendamping desa ini sebagaimana tujuan awal pembentukannya.

ANGGOTA Komisi V DPR Sri Rahayu mengatakan, dugaan bahwa tenaga pendamping desa dikerahkan untuk alat politik kelompok tertentu bukan hal baru.

Dia meyakini, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (BPSDM) Kemendes PDTT tahu persoalan ini.

"Saya yakin BPSDM (Kemendes PDTT) juga tahu sampai hari ini masih berjalan konten-konten yang dimintakan kepada pendamping untuk partai tertentu," kata Sri di Jakarta, kemarin.

Sayangnya, Sri melihat 'pemaksaan' konten-konten politik kepada pendamping desa ini masih terus berlangsung sampai hari ini.

Sejumlah pendamping desa curhat mengaku ingin mengundurkan diri karena nggak 'kerasan' atas situasi tersebut.

Sementara bagi yang tetap lanjut, mendapat intimidasi akan dikeluarkan jika tidak mau mengikuti aturan dari kelompok tersebut.

"Main yang 'cantik' Pak. Saya yakin BPSDM tahu. Tetapi yang jadi problem kenapa dibiarkan. Itu perintah langsung loh," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Dia mengatakan, sebenarnya mudah menelusuri konten-konten 'pemaksaan' pemuatan politik kepada para pendamping tersebut.

"Jejak digitalnya itu ada dan pasti kelihatan. Tidak bisa dihapus jejak digital itu," ucapnya.

Hal senada dilontarkan anggota Komisi V DPR Hamka B Kadi. Hamka meminta Kemendes PDTT mengevaluasi *output* pendamping desa ini. Apakah output pendamping desa ini betul-betul sesuai harapan atau tidak.

"Jujur saya katakan jejak digital itu banyak sekali arahannya," katanya.

Dia lalu menyoroti aplikasi absensi kepada pendamping desa ini. Absensi ini sebenarnya sangat baik namun menjadi masalah karena diarahkan untuk kepentingan politik yang tidak etis.

"Makanya saya selalu menyatakan pendamping ini masih perlu nggak ke depan? Berikan kami alasan-alasan pembenarnya," pintanya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDTT Taufik Majid mengatakan, tenaga pendamping ini tidak hanya di bawah koordinasi Kemendes PDTT. Dalam pelaksanaannya, tenaga pendamping ini juga dimintakan oleh kementerian/lembaga lain. Salah satunya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mensukseskan program 'Desa Bersinar (Bersih Narkoba).

"Itu peran edukasi pendamping juga masuk, diikutsertakan. Membantu BNN mendorong desa supaya 'Bersinar'," katanya.

Lembaga lain yang memanfaatkan tenaga pendamping desa, sambung Taufik, juga Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Bersama BPOM, tenaga pendamping desa dilibatkan untuk mewujudkan 'Desa Pangan Aman'. ■ KAL